



KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN

**SERGIO SIAHAYA
YULIUS LUTURMAS**

**KEPALA DESA SELAKU
PENGGERAK PEMBANGUNAN**

KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN

SERGIO SIAHAYA
YULIUS LUTURMAS



KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN

Penulis:
**SERGIO SIAHAYA
YULIUS LUTURMAS**

Editor:
YULIUS LUTURMAS

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : November 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-259-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Kepala Desa Selaku Penggerak Pembangunan sesuai yang ditargetkan.

Buku dengan judul Kepala Desa Selaku Penggerak Pembangunan ini berisikan mengenai kajian pada suatu desa mengenai bagaimana peran kepala desa dalam penggerak pembangunan. Hal ini didasakan setelah dana desa dari pemerintah pusat yang cukup besar. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2022, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I KONSEP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA	1
A. Konsep Pembangunan Desa	1
B. Sifat Pembangunan Desa	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA	6
A. Tujuan Pembangunan	6
B. Sasaran Pembangunan Desa	8
BAB III DIMENSI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA	11
BAB IV PERAN KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN DESA	13
A. Konsep Peran	13
B. Konsep Peran Selaku Penggerak Pembangunan Desa	14
C. Fungsi Penggerak	16
D. Dimensi Penggerak Pembangunan Desa	19
BAB V PENTINGNYA PERAN KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN	22
A. Pendahuluan	22
B. Penelitian Pendukung	31
C. Kerangka Pikir yang Dikembangkan	32
BAB VI PROSES PEMECAHAN MASALAH	35
BAB VII PERAN KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Letak Geografis Lokasi Penelitian	42
2. Topografi Wilayah	43
3. Aksesibilitas	43
B. Sejarah Desa Waihatu	43
1. Asal usul Desa Waihatu	43
2. Sejarah Pemerintahan Desa Waihatu	45

3.	Sejarah Pembangunan Desa	46
C.	Keadaan Penduduk	49
1.	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian	50
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Sosial	51
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	54
D.	Visi dan Misi Desa Waihatu	55
1.	Visi Desa	55
2.	Misi Desa	56
E.	Struktur Organisasi	57
F.	Status Pembangunan Desa Waihatu	67
G.	Partisipan	68
H.	Peran Kepala Desa dalam Penggerak Pembangunan	72
1.	Keberhasilan Pembangunan Desa	72
2.	Tersusun rencana-rencana program desa secara jelas	72
3.	Tercermin Kebutuhan Rill Warga Desa Dalam Program Desa	77
4.	Tergerak Partisipasi Warga Desa Dalam Pembangunan Desa	82
5.	Tercapai Target Program Desa	87
6.	Bagaimana Kepala Desa Selaku Penggerak Pembangunan Desa	91
a.	Memberikan Inspirasi Bagi Warga Desa	91
b.	Memberikan Arah dan Bimbingan Bagi Warga Desa	95
c.	Membangkitkan Semangat Kerja Warga Desa	98
d.	Mendorong Kegairahan Warga Desa	101
	BAB VIII PENUTUP	105
	DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

KONSEP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA

A. Konsep Pembangunan Desa

Dalam buku Talizi Duhu Ndraha yang berjudul Kybernologi istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun”. Sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti: *pertama* sadar, *kedua* bangkit, *ketiga* bentuk, *keempat* membuat/ mendirikan, *kelima* mengisi/membina. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep pembangunan tersebut. Konsep itu antara lain adalah pengembangan (Development), pertumbuhan (growl), rekontruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social), pembebasan (Liberation), perubahan (Innovation), reformasi (Reformation) dan penemuan kembali (Reinventions).

Menurut Don Murdono dan Tumpal P. Saragi (dalam Hikmat, 2004: 51) pembangunan ialah suatu proses perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, hal ini harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner melalui berbagai disiplin ilmu yang berorientasikan kepada *People Centered Development* (memanusiakan manusia) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, demokratis dan mengutamakan gender, untuk itu diperlukan perencanaan yang baik agar bejalan secara optimal.

Pembangunan Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Wujud

pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru, dalam arti akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk kedesanya, akan tetapi lebih dari itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya

intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pembangunan desa. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for Social Development by Governments). Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya di desentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu: Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplistik.

B. Sifat Pembangunan Desa

Dalam suatu pembangunan di Desa bentuk pembangunan dapat diwujudkan dengan pembangunan yang

terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Contoh dari pembangunan fisik adalah: 1.Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll, 2.Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar, 3.Prasarana sosial yaitu : gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012). contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering disebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

1. Pembangunan bidang keagamaan
2. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
3. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
4. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
5. Pembuatan surat keterangan berdomisili, dll.

Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001:47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Pembangunan yang telah

dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Gran dalam Yuwono (2001): Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Tujuan Pembangunan

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

Djiwandono menyebutkan beberapa tujuan pembangunan desa, sebagai berikut:

1. Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
4. Tujuan kebijakan menumnuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
2. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatperdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yangberkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-

baiknya.

B. Sasaran Pembangunan Desa

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Seram Bagian Barat. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri Sasaran pembangunan desa Tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa.
- c. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa.
- d. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan.
- f. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem

pembangunan desa. Konsep perencanaan pembangunan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup. Target pembanguann desa yang obejktif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram.

Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)
2. Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaanya. Disisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61)2. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan- kepentingan yang sama, Perasaan memilki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi,2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hudup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau

berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

BAB III

DIMENSI KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN DESA

Keberhasilan suatu pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan desa merupakan suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan dalam berbagai sector atau bidang baik pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka, tetapi dapat diwujudkan nyatakan dalam implementasi program pembangunan.

Pembangunan desa merupakan seluruh rangkaian usaha yang di lakukan di lingkungan desa yang memiliki tujuan utama untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, dan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dengan perencanaan yang dibuat atas dasar musyawarah di kalangan masyarakat desa. Pembangunan desa menjadi sebuah hal yang penting karena keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi Negara dan pembangunan nasional. Desa sebagai struktur terkecil dalam pemerintahan merupakan wilayah yang sangat strategis dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat karena masyarakat dapat langsung merasakan dan menikmati pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah desa terhadap semua sektor atau bidang. Desa merupakan sebuah wilayah dimana masih terdapat sumber daya alam yang masih melimpah. Namun, tentunya tanpa dukungan pemerintah maka pengembangan berbagai SDA di berbagai sektor akan terkendala. Karena itulah, saat ini pemerintah benar-benar memprioritaskan pembangunan di desa. Tidak tanggung-tanggung pemerintah mengucurkan dana APBN untuk desa yang cukup besar untuk mendukung pembangunan di desa.

Keberhasilan pembangunan memang tidak dapat diukur melalui angka dan disajikan dalam hitungan statistika. Namun, keberhasilan pembangunan desa dapat di lihat dari beberapa dimensi atau ukuran yang berjalan dalam kehidupan masyarakat desa. Beberapa ukuran atau dimensi-dimensi keberhasilan pelaksanaan suatu pembangunan desa menurut Taliziduhu Ndraha (1987) dapat dilihat dari:

1. Tersusunnya rencana-rencana program desa secara jelas.
2. Tergerak partisipasi atau peran serta masyarakat dalam program desa.
3. Terealisasi atau tercermin kebutuhan ril masyarakat dalam program desa.
4. Terealisasi target rencana dan program desa.

BAB IV

PERAN KEPALA DESA SELAKU PENGGERAK PEMBANGUNAN DESA

A. Konsep Peran

Peranan menurut Giros, Meson dan Mceahere mendefinisikan peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Thoha (2003:10) peranan adalah merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu (dalam Hendri Saputra:2009).

Peranan menurut Berry peranan itu sendiri adalah sebagai berikut: Peranan individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan fungsi sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain/dalam hidup antara atasan danbawahan. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai orang pemberi harapan pada orang lain (dalam Hendri Saputra:2009).

Peranan Pemerintah Desa diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut atau anggota ataupun orang yang berbeda didalamnya atau sekelilingnya. Pemerintah Desa merupakan orang-orang dimana tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapan. Makanya Pemerintah Desa sangat berperan dalam mewujudkan harapan-harapan itu. Harapan-harapan itu berupa:

kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan dalam mewujudkan pembangunan fisik maupun nonfisik.

Menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

B. Konsep Peran Selaku Penggerak Pembangunan Desa

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan program pembangunan dan bersosialisasi dengan masyarakat untuk

dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara serta penggerak dan penanggungjawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah setempat sangat dibutuhkan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Kepala Desa dan Perangkat Desa harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat

disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan sebagai penggerak pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Peranan kepala desa selaku penggerak pembangunan artinya menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Kepala desa berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat akan menumbuhkan semangat baru bagi masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan desa

Terhadap itu maka, menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting bagi seorang kepala desa.

C. Fungsi Penggerak

Penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh tiap manajer atau pimpinan, termasuk kepala desa dalam proses pembangunan desa.

Penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Husein Umar (2000:77) terdapat berbagai definisi pergerakan:

1. *Directing*, yakni menggerakkan orang lain dengan memberikan pengarahan.
2. *Actuating*, yakni menggerakkan orang lain dalam artian umum.
3. *Leading*, yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke suatu tujuan tertentu serta memberikan contoh-contoh.
4. *Commanding*, yakni menggerakkan orang lain disertai dengan unsur paksaan.
5. *Motivating*, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan.

Sehingga dalam hal ini penggerakkan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Tujuan dari pergerakan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien.
2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf.
3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.

5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Berdasarkan penjelasan tujuan pergerakan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pergerakan adalah bertujuan agar seseorang ingin diajak untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah dibuat dengan cara menciptakan hubungan yang baik terlebih dahulu dengan warga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Retina Sri Sedjati (2014) tahapan dalam pergerakan terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Pemberian Motivasi

Dalam pemberian motivasi hal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan semangat, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini jugadisebut dengan motivating.

2. Pemberian Bimbingan Lewat Contoh-Contoh Tindakan.

Dalam proses pemberian bimbingan dilakukan dengan memberikan contoh- contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini juga disebut dengan leading, yang meliputi beberapa tindakan seperti:

- a. Pengambilan keputusan.
- b. Mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pimpinan danbawahan.
- c. Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok.
- d. Memperbaiki sikap, pengetahuan, dan keterampilan bawahan.

3. Pengarahan

Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam

pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik.

D. Dimensi Penggerak Pembangunan Desa

Seorang pemimpin di dalam desa perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap pembangunan desa. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi dan manajemen yang dipimpinnya. Pemberian anugerah yang berupa ganjaran, hadiah, piujian atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas dan yang telah berbuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberi celaan, teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuk melaksanakan fungsi ini sebaik-baiknya, seorang pemimpin perlu menyelenggarakan daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pegawai sehingga tercatat semua hadiah maupun hukuman yang telah diberikan kepada mereka. Bukti selanjutnya adalah dalam Kepemimpinan Kepala Desa, jarang memberikan motivasi, himbauan, pembinaan kepada masyarakat untuk turut aktif terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, amat terlebih dalam menggerakkan partisipasi masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan secara swadaya.

Peran kepala desa selaku penggerak pembangunan desa dalam pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan

pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang kurang berani mengambil keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Dalam setiap pengambilan keputusan selalu diperlukan kombinasi yang sebaik baiknya dari : Perasaan, firasat atau intuisi, Pengumpulan, pengolahan, penilaian dan interpretasi fakta-fakta secara rasional – sistematis, Pengalaman baik yang langsung maupun tidak langsung, Wewenang formal yang dimiliki oleh pengambil keputusan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seorang kepala desa diharapkan dapat berhasil dalam implementasi program pembangunan desa, untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur dimensi penggerak pembangunan desa oleh kepala desa, antara lain:

- a. Memberikan dorongan atau arahan bagi warga desa dalam melakukan perencanaan program pembangunan desa melalui pertemuan atau rapat-rapat.
- b. Memberikan bimbingan bagi warga desa untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus bimbingan dalam menggerakkan warga desa.
- c. Membangkitkan semangat warga desa dalam mewujudkan cita-cita kemajuan desa lewat program pembangunan desa yang berkelanjutan.
- d. Mendorong kegairahan kerja warga desa untuk turut serta dalam proses pembangunan berlangsung, sehingga timbulnya rasa gotong royong dalam membangun desa.
- e. Memberikan inspirasi bagi warga desa lewat rencana dan penetapan program pembangunan desa untuk

menuju pembangunan desa yang berkelanjutan dan modern, Taliziduhu Ndraha (1987).